

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut Nur Aeda (2022) Pertumbuhan penduduk harusnya disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari tingkat pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Kesejahteraan suatu negara bisa dilihat dari kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia sampai sekarang ini masih menjadi sorotan utama 'termasuk dengan berbagai kebijakan serta langkah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam segi fenomenalnya kemiskinan ini adalah permasalahan sosial yang selalu dikaji oleh pemerintahan baik yang di pusat maupun pada daerah. Kompleksnya persoalan kemiskinan memerlukan upaya penyelesaian yang bersifat utuh yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Berbagai asumsi dan pendapat mengatakan bahwa kemiskinan ini dipicu oleh krisis ekonomi yang terus berkepanjangan. Menurut penelitian Intan (2022) Seseorang yang hidup dalam kemiskinan adalah orang yang lemah dan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia juga tidak dapat menikmati hidup dalam berbagai hal, seperti kesempatan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk menutupi semua pengeluarannya di lingkungannya.

Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas kehidupan sehari-hari suatu penduduk, mulai dari asupan kebutuhan harian seperti makanan pokok yang tidak dapat terpenuhi hingga mencakup ke tingkat pendidikan yang minim bahkan rendahnya tingkat kesehatan pada masyarakat. Hal ini disebabkan juga karena

kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, gizi bahkan sampai kebutuhan yang tidak tercukupi pada anak dan ibu hamil. Kemiskinan juga dapat menyebabkan dampak yang negatif terhadap tatanan sosial bahkan bisa secara menyeluruh. Lebih lanjut Norsanti (2019) pada penelitiannya dalam hal perkembangan generasi penerus pada bangsa ini, kemiskinan memberikan dampak yang sangat signifikan dan kemiskinan bukan hanya masalah dengan skala nasional karena kemiskinan ini sudah menjadi masalah dengan skala internasional yang mana semua negara-negara di dunia terlebih negara-negara berkembang berusaha untuk mengatasi permasalahan tingkat kemiskinan di setiap negaranya yang terus meningkat setiap tahunnya.

Banyak permasalahan-permasalahan kecil yang semua berawal dari faktor kemiskinan ini, salah satunya dampak yang paling sering terjadi dari masalah kemiskinan yaitu tindakan kriminalitas atau tindak kejahatan yang semua motifnya berasal dari masalah kemiskinan yang dialami oleh pelaku, pelaku yang melakukan tindakan kriminal ini rata-rata motif tindakan yang mereka lakukan karena sudah tidak tau cara apalagi yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian baik untuknya pribadi maupun pelaku yang sudah mempunyai keluarga, mereka melakukan tindakan kriminalitas itu karena sudah sangat kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya ditambah pada latar belakang mereka orang yang pendidikannya dibawah standar sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, apalagi di masa saat sekarang ini yang keadaannya semua orang berlomba-lomba mencari lapangan pekerjaan baru guna menambah kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka usaha percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pada tahun 2007 pemerintah indonesia telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Di luar negeri ada program yang mirip seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ini, yakni program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Transfers (CCT), yang mana programnya telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut. Untuk Indonesia sendiri Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI (2020) sudah berlangsung selama ini dalam rangka

membantu rumah tangga sangat miskin atau keluarga sangat miskin (RSTM/KSM). Meningkatkan mutu hidup KPM, menurunkan biaya yang terkait dengan pengeluaran KPM, mendorong kemampuan keuangan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM, serta menurunkan angka kemiskinan merupakan tujuan PKH. Lebih lanjut dalam penelitian Norsanti (2019) mendapatkan bila hasil evaluasi menyebutkan bahwa penerima program telah memenuhi tujuan PKH, maka KSM dikeluarkan sebagai penerima PKH (*exit strategy*). Sebaliknya, bila KSM penerima manfaat masih menerima PKH hanya dibatasi maksimal 6 tahun.

Dengan diciptakannya PKH ini diharapkan penerima manfaat PKH ini memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan berbagai pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. PKH akan memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut dalam penelitian Domri (2019) Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan income effect kepada RTSM/KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya).

Dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap daerah di Indonesia, tidak semua program bisa terealisasi secara baik atau secara menyeluruh di daerah tertentu, pasti ada permasalahan dan hambatannya masing-masing yang berbeda di setiap daerah. Seperti contoh untuk faktor yang membuat program bisa terealisasi dengan baik disertai dengan permasalahan yang menjadi hambatan pada masing-masing daerahnya bisa ditemukan dalam penelitian Lilis (2023) tentang faktor pendorong dan penghambat keberhasilan graduasi mandiri keluarga penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah, analisis ini menemukan bahwa wilayah tersebut memiliki KPM PKH tertinggi di Provinsi Lampung hasil penelitian menunjukkan seluruh penerima PKH setelah mereka berhenti menerima memiliki kehidupan yang sukses. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan bersih per bulan yang berada di atas UMK Lampung Tengah. Pendapatan minimal setiap anggota rumah tangga juga lebih tinggi dari batas

kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah. Kemampuan mengelola keuangan keluarga, pandangan hidup yang positif, dan kemauan yang kuat untuk sukses merupakan beberapa komponen kunci lulusan yang mandiri dan sejahtera di Kabupaten Lampung Tengah. Namun, kesenjangan dalam cara pandang SDM PKH menjadi kendala, sebagian besar karena self efficacy atau keyakinan terhadap kemampuannya untuk melakukan sesuatu atau mengatasi situasi tertentu yang diberikan Pendamping Sosial PKH masih lemah. Melihat dari contoh kasus penelitian diatas, peneliti disini ingin menemukan salah satu permasalahannya yaitu mengenai menganalisis faktor-faktor yang menurut peneliti bisa mempengaruhi suatu keluarga/rumah tangga untuk bisa mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada wilayah yang akan dijadikan sebagai data pada penelitian yang akan dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Pada hal umumnya suatu keluarga agar bisa masuk syarat untuk menjadi peserta dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini keluarga tersebut harus terdaftar di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dari Kementerian Sosial RI (2024) juga mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dan dalam proses untuk bisa terdata dalam DTKS itu penduduk harus sesuai kriteria penilaian dalam menentukan apakah penduduk itu layak untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan atau tidak. Lalu salah satu alasan lainnya wilayah diambil Kota Padang sebagai objek penelitian karena peneliti lumayan sering melihat kegiatan program ini untuk wilayah Kota Padang, terlebih peneliti belum menemukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang menurut peneliti bisa mempengaruhi suatu keluarga/rumah tangga untuk bisa mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

Berdasarkan dari penjelasan yang dipaparkan diatas, didapatkan pertanyaan penelitian ini yakni bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti umur, pendidikan, pekerjaan serta fasilitas kehidupan sehari-hari yang dimiliki sebuah rumah tangga

itu bisa mempengaruhi rumah tangga tersebut untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Padang.

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan di atas sehingga didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh dari faktor variabel yang dipilih yakni umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, jaminan kesehatan yang dimiliki, banyaknya anggota rumah tangga, status bangunan yang ditempati, status pekerjaan dan kemiskinan (diukur dengan tingkat pengeluaran) terhadap rumah tangga dalam mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Padang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan kegunaan bagi banyak pihak, untuk lebih lengkap berikut penjelasannya:

- Dari hasil yang akan ditemukan nantinya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menerima Program PKH bisa menjadi acuan untuk pemerintah terkait dalam menetapkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
- Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor yang telah ditentukan tadi dari awal bisa mempengaruhi rumah tangga dalam mendapatkan Program Keluarga Harapan.
- Dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dan pedoman bagi khalayak umum, bisa juga untuk menjadi bahan pada penelitian selanjutnya.